

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan besar yang dihadapkan kepada dunia khususnya di abad ke dua puluh satu ini adalah, masalah kependudukan. Jumlah penduduk di dunia semakin menunjukkan angka yang terus bertambah, dan telah menimbulkan berbagai masalah kesulitan dalam kehidupan. Sebagai petunjuk dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1950-an, berjumlah 2,5 milyar. Dua dasawarsa kemudian, jumlah itu mencapai angka 3,7 milyar. Pada akhir dekade 1980-an, diperkirakan penduduk dunia bertambah 90 juta per tahun. Kalau perkiraan ini benar, maka pada akhir abad ke-21 sekitar 6,25 milyar anak manusia akan memadati planet bumi. Dan pada tahun 2025 nanti, angka itu diperkirakan membengkak menjadi 8,5 milyar (BKKBN, 1992).

Potensi sumberdaya manusia sangat dibutuhkan pada pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, tanpa adanya kebijakan komprehensif, yang berperan sebagai mekanisme kontrol untuk mengatur tingkat pertumbuhannya, maka permasalahan kependudukan dapat menghambat proses pembangunan. Hal ini banyak terjadi, terutama di negara – negara yang sedang berkembang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah kependudukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif seperti, jumlah penduduk relative besar akibat pertumbuhan yang relative tinggi, penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, komposisi menurut umur yang tidak seimbang, arus urbanisasi yang relative tinggi, dan berbagai permasalahan lain yang mengiringinya.

Jumlah Penduduk Indonesia pada tahun 2010, berdasarkan hasil sensus penduduk sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783

perempuan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk mencapai 234.639.997 orang. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 % per tahun. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan tantangan berat bagi keberhasilan pembangunan (BPS, 2010). Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat suksesnya pelaksanaan pembangunan di Indonesia, karena itu pemerintah berusaha terus menekan angka pertumbuhan penduduk melalui berbagai cara, seperti menciptakan undang – undang perkawinan yang hanya memperkenankan penduduk menikah mulai usia 20 tahun, tidak memformalkan seorang laki – laki berpoligami, serta berbagai usaha lain yang mampu menekan laju pertumbuhan penduduk.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah menekankan laju pertumbuhan penduduk melalui sistem bidang kesehatan adalah pembangunan keluarga sejahtera , yaitu meningkatkan jumlah keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa. Usaha mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya melalui Program Keluarga Berencana (Depkes RI, 1982).

Program keluarga berencana yang sudah di mulai sejak Repelita I (1969-1974) bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi, dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan lebih meningkat. Oleh karena itu usaha - usaha KB yang sudah dimulai

sejak Repelita terus ditingkatkan lagi dalam Repelita selanjutnya. Melalui pelaksanaan keluarga berencana oleh berbagai organisasi kemasyarakatan serta pemerintah daerah.

Jumlah akseptor baru program KB ditingkatkan setiap tahun. Pembina anak sepor-akseptor yang ada dipergiat untuk menjaga kelangsungannya. Peningkatan sasaran ini membutuhkan peningkatan kemampuan organisasi dan administrasi pelaksanaan. Selain dari pada itu kegiatan-kegiatan pelayanan medis, penerangan dan motivasi, pendidikan dan latihan, serta penelitian ditingkatkan. Namun demikian, usaha pencapaian program KB diberbagai wilayah tidak selalu berhasil. Berbagai kendala dirasakan, selain dari pihak pemerintah, kendala datang dari kondisi sosial masyarakat. Ketidakberhasilan program KB juga di temukan di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan hasil pendataan dua tahun (2006-2007) pencapaian akseptor baru sangat rendah, yaituhanya 14,25 % pada tahun 2006 dan 13,43 % tahun 2007 dari jumlah pasangan usia subur, sedangkan target nasional yang harus dicapai 60,88 % (BPS, 2010).

Desa Reudeup merupakan salah satu desa di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Menurut data yang diperoleh dari Kepala Desa Reudeup tahun 2010, dari jumlah 397 KK dengan 258 KK pasangan usia subur (PUS), dan jumlah peserta KB yang aktif adalah sebesar 139 KK. Pencapaian ini masih di bawah target yang telah ditentukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasangan usia subur terhadap pentingnya program KB untuk menjamin kesehatan ibu dan anak serta kebahagiaan keluarga.

Pengamatan penulis sebagai putra daerah adalah kegagalan pelaksanaan program KB terkait erat dengan kultur masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai budaya setempat dan nilai agama. Selain faktor sosio kultural dan agama diduga turut mempengaruhi persepsi pasangan usia subur terhadap program KB yaitu usia melangsungkan pernikahan khususnya perempuan, yang mengakibatkan banyak yang hidup berkeluarga dalam usia muda. Perkawinan dalam usia muda cenderung mempunyai banyak anak, karena menyebabkan

pasangan ini tidak punya / kurang memiliki persepsi yang baik tentang keluarga bahagia / sejahtera. Program sosialisasi oleh pemerintah tentang program KB diduga turut berperan dalam keikutsertaan masyarakat pada program ini, terjadinya konflik bekepanjangan di NAD tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan sosialisasi KB, sehingga program ini belum mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini ditandai oleh, banyak keluarga yang memiliki anak yang jumlahnya lebih dari dua orang dalam setiap pasangan usia subur, bahkan mencapai 4-5 orang anak. Karena itu melalui penelitian ini penulis tertarik menemukan jawaban penyebab permasalahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, ternyata masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan keluarga berencana merupakan hal yang kompleks dan saling berkaitan. Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut : kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang dilandasi oleh tanggung jawab, kesukarelaan, nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, usia pernikahan khususnya perempuan serta masih adanya pemahaman tentang keluarga berencana yang sempit, baik di kalangan masyarakat maupun para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Selain itu, masih ada persepsi bahwa banyak anak akan membawa rezeki, kendala lainnya, masih adanya anggapan atau pengetahuan dari para tokoh agama bahwa program keluarga berencana hanya untuk membatasi jumlah anak atau kelahiran saja, dan nilai agama yang menyatakan bahwa program KB haram. Dan faktor usia melangsungkan pernikahan PUS khususnya bagi perempuan diduga juga menjadi penyebab ketidakberhasilan program KB, sehingga menjadi suatu hambatan bagi terlaksananya keluarga berencana.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah Faktor – faktor penyebab (agama, adat istiadat, usia pernikahan PUS dan sosialisasi KB) ketidakberhasilan program keluarga berencana (KB) di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor agama menjadi penyebab ketidakberhasilan program keluarga berencana di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
2. Apakah faktor adat istiadat menjadi penyebab ketidakberhasilan program keluarga berencana di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
3. Apakah faktor usia pernikahan PUS menjadi penyebab ketidakberhasilan program keluarga berencana di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
4. Apakah faktor sosialisasi KB menjadi penyebab ketidakberhasilan program keluarga berencana di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh faktor agama terhadap ketidakberhasilan program keluarga berencana di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
2. Pengaruh faktor adat istiadat terhadap ketidakberhasilan program keluarga berencana di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
3. Pengaruh faktor usia pernikahan PUS terhadap ketidakberhasilan program keluarga berencana di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
4. Pengaruh faktor sosialisasi KB terhadap ketidakberhasilan program keluarga berencana di Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijaksanaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB).
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada lokasi yang berbeda.
3. Sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan dan keterampilan menulis dalam membuat karya tulis ilmiah khususnya skripsi.

